

THE 1971 ELECTION IN SEMARANG CITY: GOLKAR'S CURATED CONTESTATION IN NEWSPAPER

Pemilu 1971 di Kota Semarang: Kontestasi Golkar yang Terkurasi dalam Pemberitaan

Lamia Rozianna Putri ^{1a(*)} Putri Agus Wijayati ^{2b}

¹²Universitas Negeri Semarang, Semarang

^aroziannalamia@gmail.com

(*) Corresponding Author
roziannalamia@gmail.com

How to Cite: Lamia Rozianna Putri. (2025). Pemilu 1971 di Kota Semarang: Kontestasi Golkar yang Terkurasi dalam Pemberitaan. doi: 10.36526/js.v3i2.5488

Received : 06-06-2025
Revised : 25-07-2025
Accepted: 27-07-2025

Keywords:

Golkar,
Newspaper,
Election,
Semarang.

Abstract

This research is a study of Golkar news curated in newspapers during the 1971 election. The writing uses historical research methods consisting of heuristics, verification, interpretation, and historiography stages. As a result, Golkar, to win the campaign, used the ABG (ABRI, Bureaucracy, Golkar) strategy. Newspaper reports revealed the strategy's implementation through a variety of tactics, including songs, rhymes, and slogans. Golkar used these methods to convey his presence among the people. The news also narrated how much the people supported Golkar. Furthermore, one can observe the disparities in coverage between government-affiliated and independent newspapers. In the end, the propaganda through these newspapers succeeded in making Golkar win the election contest in Semarang City with 58% of the vote. After the victory, the government established KORPRI and conducted party diffusion.

PENDAHULUAN

Indonesia menjadi salah satu negara yang menerapkan sistem demokrasi. Dalam negara demokrasi, pemilihan umum menjadi pilar utama sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi prinsip dan kedaulatan rakyat (Labolo & Ilham, 2015). Pemilu memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi secara langsung dalam menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan negara melalui wakil-wakil rakyat yang dipilih secara bebas dan adil. Namun, dalam pelaksanaannya tidak selalu berlangsung dengan ideal. Hal ini, seringkali dimanfaatkan untuk mempertahankan kekuasaan oleh kekuatan politik yang berkuasa atau dominan (Ashadi Siregar, 2000). Penguasa kerap memanipulasi informasi, menekan oposisi, mengendalikan dan menjadikan media massa sebagai alat propaganda yang dapat mengendalikan opini rakyat. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan pemilu tidak menjamin terwujudnya demokrasi yang hakiki. Demokrasi hanya menjadi formalitas yang tidak disertai dengan proses yang adil dan transparan, tetapi cenderung lebih mengarah pada demokrasi semu atau dikenal dengan istilah *Pseudo Democracy* (Fahira, 2024).

Perwujudan demokrasi semu ini dapat dilihat dari aktivitas dan sarana kampanye yang dilakukan oleh kontestan pemilu. Kampanye merupakan serangkaian kegiatan yang terorganisasi untuk berdialog dengan pemilih atau rakyat yang sudah mempunyai hak pilihnya (Baum & Owens, 2023; Bittner & Peterson, 2018; Roslan, 2005). Kegiatan kampanye yang seharusnya menjadi ruang terbuka bagi kontestan untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja kepada publik justru menjadi instrumen legitimasi kekuasaan oleh penguasa. Namun, kampanye yang seharusnya menjadi ruang yang adil bagi seluruh kontestan justru dikendalikan dan didominasi oleh pihak penguasa melalui propaganda politik untuk mendapatkan kesan positif dan dukungan rakyat. Dalam hal ini, media massa menjadi salah satu instrumen yang digunakan untuk mengkampanyekan salah satu pihak politik secara masif. Sementara, pihak oposisi mendapatkan akses yang lebih sempit dan cenderung terabaikan yang menyebabkan adanya ketimpangan dalam persaingan politik.

Penggunaan media massa secara masif untuk mempertahankan kekuasaan dapat dilihat ketika masa pemerintahan Orde Baru. Presiden Soeharto melalui Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) berupaya untuk melegitimasi dan mempertahankan kekuasaannya. Upaya ini direalisasikan dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 1971 (Van Dijk, 1992). Untuk pertama kalinya, Sekber Golkar mengambil bagian sebagai salah satu kontestan. Meskipun baru pertama kali berkontestasi, nyatanya Golkar mampu mendominasi kegiatan pemilu. Dominasi tersebut tidak terlepas dari dukungan pemerintah dan pemanfaatan media massa, terutama surat kabar. Surat kabar menjadi salah satu instrumen penting dalam strategi Golkar yang berperan sebagai media komunikasi politik antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan pesan untuk pemenuhan kebutuhan (Putra, 2012). Dalam hal ini, berkaitan dengan kebutuhan suara yang berusaha diraih oleh Golkar dalam kontestasi pemilihan umum 1971. Melalui Surat Kabar, Golkar berupaya membentuk identitasnya sebagai representasi “rakyat pekerja” (Budiman, 1990). Hal ini, tercermin dalam tema kampanye yang diusung berkaitan dengan pembangunan dan stabilitas politik yang terkurasi dalam pemberitaan di surat kabar. Pemberitaan-pemberitaan tersebut berkaitan dengan aktivitas kampanye oleh Sekber Golkar, khususnya di Kota Semarang. Selain itu, Golkar menggunakan lagu-lagu, pantun, dan slogan yang bernuansa ajakan untuk menarik suara rakyat.

Dominasi Golkar di Kota Semarang menjadi suatu hal yang menarik, mengingat pada penyelenggaraan pemilihan umum sebelumnya di tahun 1955, Partai Komunis Indonesia (PKI) berhasil mendominasi dan menjadi pemenang. Kala itu, PKI berhasil memenangkan kontestasi dengan berhasil memperoleh suara sebanyak 54%. Kemenangan tersebut tidak terlepas dari latar belakang historis, di mana Kota Semarang merupakan tempat awal kemunculan partai ini hingga menjadi partai besar. Selain itu, dari kondisi sosial-politik, Kota Semarang pada masa kolonial mengalami industrialisasi yang meningkatkan populasi buruh, di samping petani. Saat itu, industrialisasi justru mengeksploitasi pekerja dan meningkatkan kesenjangan sosial. PKI kemudian hadir sebagai wadah untuk melawan ketidakadilan tersebut (Ahmad et al., 2019). Namun, peristiwa Gerakan 30 September 1965 oleh PKI menjadi titik balik kejatuhan partai tersebut. PKI menjadi partai yang diharamkan dalam perpolitikan di Indonesia. Pasca terjadinya peristiwa tersebut, pemerintah Orde Baru gencar melakukan kampanye anti-komunis yang turut membentuk opini publik untuk menolak segala bentuk ideologi kiri. Momentum ini yang digunakan oleh Golkar untuk menegaskan citranya sebagai kekuatan non-ideologis yang menjanjikan keamanan, stabilitas, dan kemajuan ekonomi melalui pembangunan (Suryadinata, 2002). Dalam hal ini media massa memiliki peran penting, khususnya surat kabar dalam menyuarakan program-program Golkar dan meningkatkan citranya di publik.

Berbagai kajian yang membahas mengenai pemilu seperti Puspita, dalam kajiannya menjelaskan tentang kemenangan Golkar di Kota Semarang pada pemilu 1971 dengan menggunakan strategi ABG, yaitu ABRI, Birokrasi, dan Golkar (Puspita, 2012). Pembahasan mengenai Golkar juga dibahas oleh (Juniardi, 2006) yang secara keseluruhan membahas mengenai dominasi Golkar di Kota Semarang antara tahun 1971-1997. Kajian (Ahmad et al., 2019) membahas mengenai faktor lain yang memengaruhi kemenangan suatu partai pada kontestasi pemilu dalam hal ini kemenangan PKI di Kota Semarang pada pemilu 1955 yang turut dipengaruhi oleh faktor kondisi sosial-politik. Sejalan dengan ini (Dewantarina, 2012) membahas tentang kampanye PNI sebagai salah satu kontestan pada pemilu 1955. Kebaharuan dalam penelitian ini yaitu mengkaji tentang strategi Golkar di Kota Semarang dalam kontestasi pemilu 1971 yang terkurasi dalam pemberitaan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat isi pemberitaan mengenai Golkar, termasuk lagu-lagu, pantun, slogan dan ajakan yang menjadi bagian dari strategi komunikasi yang tetap mempertahankan pesan utama tentang pembangunan dan stabilitas.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang bertujuan merekonstruksi peristiwa pada masa lampau melalui jejak-jejak atau sumber-sumber dalam narasi yang utuh (Kuntowijoyo, 2008). Untuk itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari 4 tahap, yaitu

heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi (Gottschalk, 1975; Kuntowijoyo, 2005). Pertama, tahap heuristik merupakan tahap pencarian dan pengumpulan sumber-sumber sejarah yang relevan dengan topik penelitian meliputi sumber primer dan sumber sekunder. Penggunaan sumber primer membantu dalam proses rekonstruksi peristiwa masa lalu (Wijayati, 2009). Sumber primer yang digunakan berupa sumber tertulis, yaitu surat kabar. Surat kabar yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Depo Arsip Suara Merdeka serta Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Jawa Tengah. Ada pun surat kabar yang digunakan terdiri dari Angkatan Bersendjata dan Suara Merdeka. Sementara, sumber sekunder yang digunakan berupa artikel ilmiah, skripsi, dan buku yang diakses melalui perpustakaan dan berbagai media digital. Kedua, tahap verifikasi atau kritik sumber merupakan tahap yang dilakukan guna memvalidasi fakta-fakta orisinil yang informasinya relevan dengan topik penelitian. Tahap verifikasi dibagi menjadi dua, yaitu kritik eksternal yang dilakukan untuk memastikan keaslian sumber, mencakup identifikasi tanggal terbit, penerbit, dan otentisitas sumber dan kritik internal yang dilakukan untuk mengetahui isi dari sumber yang ada. Ketiga, tahap interpretasi merupakan proses menafsirkan dan memahami fakta-fakta yang telah diverifikasi pada tahap kritik sumber. Tahap ini dilakukan untuk menyusun keterkaitan antara fakta satu dengan yang lain, sehingga dapat menjelaskan konteks penelitian. Keempat, tahap historiografi atau penulisan sejarah merupakan proses penyusunan narasi sejarah berdasarkan hasil analisis dan interpretasi secara kronologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara geografis, Kotamadya Semarang pada tahun 1971 tercatat memiliki luas 99,4 km² (Biro Pusat Statistik, 1971). wilayahnya terbagi menjadi 5 kecamatan dengan 112 kelurahan. Berikut merupakan luas wilayah dan jumlah penduduk di masing-masing kecamatan:

Tabel 1: Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Masing-Masing Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas Daerah (km ²)	Jumlah Penduduk
1.	Semarang Barat	30,97	167.928
2.	Semarang Selatan	24,81	91.387
3.	Semarang Tengah	2,79	82.455
4.	Semarang Timur	23,9	149.383
5.	Semarang Utara	11,93	166.889
Jumlah Luas		99,4	685.042

Sumber: Kotamadya Semarang dalam angka tahun 1971.

Melalui tabel di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan Semarang Barat menjadi kecamatan dengan wilayah yang paling luas, yaitu 30,97 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 167.928 jiwa. Sementara, Kecamatan Semarang Tengah menjadi kecamatan dengan wilayah paling sempit, yaitu 2,79 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 82.455 jiwa. Dari total 685.042 jiwa penduduk, tercatat sebanyak 285.565 jiwa yang memiliki hak suara sah (Kotamadya Semarang dalam angka tahun 1973). Sementara itu, menurut koran Suara Merdeka terdapat 313.000 orang dengan hak suara (Suara Merdeka, 30 Juni 1971). Selisih angka dalam laporan BPS dan surat kabar Suara Merdeka menunjukkan adanya kompleksitas administrasi pemilu pada masa Orde Baru, serta terbukanya ruang bagi manipulasi data demi kepentingan politik. Validitas data pemilu menjadi rancu, terutama dalam konteks pemilihan yang dikendalikan pemerintah melalui militer dan birokrasi. Keterlibatan institusi non-sipil dalam penyelenggaraan pemilu dapat menjadi faktor pemicu adanya tumpang

tindih data karena lemahnya akurasi pencatatan penduduk dan kurang transparan dalam proses pemutakhiran daftar pemilih (Crouch, 2007). Selain itu, faktor politik juga dapat mempengaruhi perbedaan data tersebut. Dalam hal ini, Golkar merupakan kendaraan politik bagi Pemerintah Orde Baru. Melalui konteks tersebut, jumlah data yang ditampilkan dalam surat kabar Suara Merdeka tampak lebih banyak dan terkesan menunjukkan antusiasme masyarakat. Sementara, data BPS lebih bersifat administratif dan teknis, serta dianggap lebih objektif. Namun, jika dilihat dalam konteks birokrasi, BPS sebagai suatu institusi berada di bawah pengaruh pemerintah yang berkuasa. Faktor lain yang dapat mempengaruhi adalah cepatnya perubahan data penduduk yang tidak diimbangi dengan sistem pelaporan, serta perbedaan perhitungan antara hak suara berdasarkan jumlah penduduk usia pemilih dengan daftar pemilih tetap yang telah divalidasi (Ufen, 2009).

GOLKAR DAN STRATEGI DOMINASI ELEKTORAL

Pada awalnya, Golongan Karya (Golkar) bukan partai politik, tetapi merupakan wadah golongan fungsional di masyarakat. Secara resmi, Golongan Karya terbentuk pada 20 Oktober 1964 dengan nama Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar). pembentukannya diprakarsai oleh militer dengan konsep Dwifungsi ABRI sebagai respons terhadap konflik politik dan kerusakan yang dipicu oleh aktivitas organisasi terlarang khususnya PKI. Tujuan pembentukannya untuk mewadahi golongan masyarakat yang tidak tergabung berafiliasi dengan partai politik tertentu (Puspita, 2012). Situasi dan kondisi nasional di atas memengaruhi pembentukan Sekber Golkar di berbagai daerah, termasuk Jawa Tengah secara umum dan Kotamadya Semarang secara khusus. Pembentukan Sekber Golkar Jawa Tengah berlangsung di Gedung Balai Polisi Semarang pada tanggal 13 Agustus 1965. Organisasi Trikarya yang terdiri dari Soksi, Kosgoro, dan MKGR berperan sebagai koordinator kepengurusan (Juniardi, 2006).

Pemilu 1971 menjadi momentum pertama bagi Sekber Golkar sebagai bagian dari kontestan pemilu (Al Izzati et al., 2024). Penyelenggaraan pemilu di tahun ini diikuti oleh 10 kontestan yang terdiri dari 9 partai politik (Partai Nasional Indonesia, Nahdlatul Ulama, Partai Khatolik Indonesia, Partai Kristen Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, Partai Muslimin Indonesia, Partai Islam Persatuan Tarbiyah Indonesia, Partai Murba, dan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia), dan Golongan Karya (Poeponegoro, 2008). Kepengurusan Sekber Golkar Kotamadya Semarang menjelang pemilu terdiri dari unsur-unsur Soksi, Kosgoro, dan MKGR yang diketuai oleh Imam Sumardi. Selain itu, dibentuk pula Badan Pengendali Pemilu (Bappilu) yang bertugas mengendalikan anggota dan menyepakati Pohon Beringin sebagai lambang Sekber Golkar (Bangun, 1997).

Dalam upaya memenangkan kontestasi, Golkar menjalankan strategi yang dikenal dengan istilah "ABG", yang dijabarkan menjadi ABRI, Birokrasi, dan Golkar. ABRI melalui konsep dwifungsi memiliki dua peran utama, yaitu dalam bidang pertahanan keamanan (hankam) dan di luar bidang hankam (Mackie, 1970). Dalam bidang hankam, ABRI berperan sebagai stabilisator pertahanan dan keamanan. Sementara, dalam bidang non hankam berperan sebagai stabilisator di bidang sosial, politik, hingga ekonomi. Artinya, konsep ini menempatkan ABRI sebagai stabilisator dan dinamisator pembangunan nasional yang turut bertanggung jawab terhadap kelangsungan pembangunan nasional dan stabilitas politik (Crouch, 2007; Jenkins, 1984). Pada dasarnya, Presiden Soeharto melalui Golkar menjadikan pemilu 1971 sebagai arena formal untuk membangun legitimasi kekuasaannya dan mendapatkan dukungan penuh dari ABRI. Dalam menggalang dukungan rakyat, langkah yang dilakukan mulai dari mobilisasi aparat hingga penggunaan struktur komando teritorial. Tidak netralnya sikap ABRI secara sistematis tampak dari mobilitas para anggotanya yang turut aktif memberikan pembinaan kepada rakyat dan aktif mengawasi jalannya kampanye (Crouch, 2007). Bahkan, dalam pelaksanaannya turut memfasilitasi dari aspek komunikasi massa melalui media cetak dan penyuluhan sosial (Sundhaussen, 1982). Salah satu media cetak yang digunakan oleh ABRI adalah surat kabar Angkatan Bersendjata yang secara masif selalu memberitakan mengenai Golkar.

Dalam suatu pemberitaan menyebutkan bahwa Persatuan Ibu Purnawirawan (PERIP) turut menjadi bagian dari Sekber Golkar cabang Kodya Semarang (Angkatan Bersendjata, 1971ae). Kapten T. Soedarno selaku Ka Pendim 0733, turut aktif memberikan penyuluhan mengenai pemilu kepada warga Asrama Kusumawardani yang juga dihadiri oleh anggota ABRI. Pada kesempatan itu, Kepala Asrama, Letkol H. A. Djamhuri menekankan agar warga asrama benar-benar memahami materi yang diberikan agar dapat memastikan kemenangan Orde Baru melalui Golkar (Angkatan Bersendjata, 1971ak). Bertempat di aula Kodim 0733 Semarang, Sabtu, 24 April 1971, dalam rangka HUT Persit KCK berlangsung pertemuan antara ibu-ibu Warakawuri yang tergabung dalam Persit KCK Ranting Kodim 0733. Ketua Persit KCK Ranting Kodim 0733, Ibu Untung Sridadi menjelaskan bahwa tugas ibu Warakawuri dalam pemilu nanti harus dilaksanakan dengan tepat sebagai kelanjutan dari pengorbanan almarhum suami para ibu-ibu (Angkatan Bersendjata, 1971an). Penjabaran di atas jelas menunjukkan keterlibatan aktif para anggota ABRI beserta istri dan seluruh elemen yang ada di dalamnya berupaya keras untuk memenangkan Golkar dalam pemilu nanti.

Presiden Soeharto sedari awal memposisikan Golkar sebagai golongan fungsional, bukan sebagai partai politik konvensional. Konsep ini membuat birokrasi menjadi aspek penting dalam politik Golkar yang kemudian mengarahkan para pegawai negeri sipil, kepala desa, camat, hingga kepala daerah untuk mendukung dan mengkampanyekan program-programnya (Crouch, 2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri No.12 Tahun 1969, menyatakan bahwa pegawai negeri wajib memiliki kesetiaan tunggal dan hanya menyalurkan aspirasi politik terhadap Golkar. Kebijakan Monoloyalitas ini pada awalnya merupakan upaya menjaga netralitas birokrasi, hingga akhirnya justru beralih menjadi loyalitas eksklusif terhadap pemerintah melalui Golkar (Fahira, 2024). Pada saat itu, pegawai negeri dilarang berpihak atau memilih partai selain Golkar (Ricklefs, 2008). Mereka loyal nantinya akan mendapatkan promosi jabatan, sedangkan bagi yang membangkang terancam dimutasi hingga dicopot dari jabatannya (Crouch, 2007). Bahkan, untuk semakin mengikat loyalitas para pegawai negeri, Medagri, Amir Machmud menyatakan nantinya akan dibentuk satu Korps Pegawai Pemerintah. Nantinya disetiap departemen akan dibentuk Korps Karyawan sebagai wadah organisasi pegawai negeri. Langkah ini dilakukan agar para pegawai terbebas dari loyalitas kepartaian, sehingga mencegah adanya loyalitas bercabang yang dapat merongrong dan mengganggu jalannya pemerintahan (Angkatan Bersendjata, 1971am).

Strategi terakhir adalah Golkar itu sendiri melalui program pembangunan nasional. Dalam berbagai kegiatan kampanye, Golkar selalu menggaungkan tentang pembangunan dan menyatakan diri sebagai pihak yang akan membawa Indonesia pada kemajuan. Fokus kampanyenya selalu mengarah pada pencapaian stabilitas politik dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang dikemas dalam program jangka panjang Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Selaras dengan hal tersebut, Sekjen Sekber Golkar Pusat, Brigjen Sapardjo menegaskan bahwa pemerintah Orde Baru melalui Golkar bertekad mensukseskan Pelita Tahap I. Dalam upaya mensukseskan program tersebut, seluruh anggota berkewajiban melaksanakan dan mendukung perbaikan nasib sendiri dengan memperbanyak golongan karya dan memenangkannya (Angkatan Bersendjata, 1971t). Sebagai golongan yang berada di pihak pemerintah, Golkar mendapatkan dukungan penuh dari jalur ABRI dan Birokrasi (Fahira, 2024). Selain itu, dengan pola organisasi yang terstruktur vertikal seperti militer semakin memudahkan komunikasi dan meminimalkan kecenderungan terjadi konflik internal. Terlebih karena bentuk organisasinya yang bukan sebuah partai melainkan suatu kelompok sosial-politik, membuat Golkar lebih fleksibel menerapkan prinsip monoloyalitas dan mendapat dukungan dari berbagai pihak (Puspita, 2012).

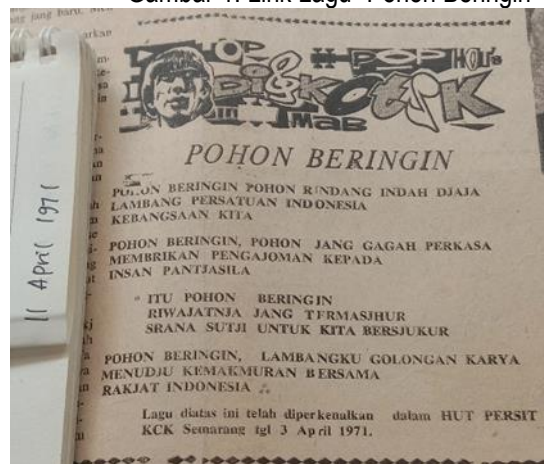
KURASI NARASI: MEMBANGUN CITRA POSITIF

Dalam menyebarluaskan program-programnya, Golkar menggunakan berbagai macam cara termasuk pemanfaatan media massa, khususnya surat kabar. Pemberitaan surat kabar pada saat itu didominasi oleh kegiatan kampanye Golkar. Masa kampanye sendiri mulai berlangsung sejak 27 April – 25 Juni 1971 (Angkatan Bersendjata, 1971ai). Sesuai pasal 1 sub 3 Keppres 68/1970, yang dimaksud sebagai kampanye berupa pawai, siaran RRI/TVRI, penyebaran/penempelan di

tempat umum berupa poster, plakat, surat-surat selebaran, slide, spanduk, slogan, semboyan, brosur, tulisan, dan media massa (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1970, n.d.). Jika suatu partai politik atau organisasi akan mengadakan kampanye, maka oleh Komandan Resort Kepolisian Kota Semarang dihimbau untuk menyerahkan surat pemberitahuan selambat-lambatnya 3x24 jam (suara Merdeka, 1971a).

Meskipun kampanye baru resmi dimulai pada tanggal 27 April, tetapi jauh sebelum itu sudah banyak pemberitaan mengenai Golkar di surat kabar, terutama surat kabar Harian Angkatan Bersendjata. Ini tidak mengherankan karena surat kabar tersebut berada di bawah naungan ABRI yang mana institusi tersebut masuk dalam salah satu dari tiga strategi pemenangan Golkar. Adapun langkah yang dilakukan dalam mengenalkan Golkar adalah melalui lagu-lagu. Kegiatan menyanyikan lagu tersebut berlangsung pada tanggal 3 April 1971 bersamaan dengan HUT Persit KCK Semarang (Angkatan Bersendjata, 1971ac). Lagu yang dinyanyikan bertemakan lambang Golkar "Pohon Beringin". Berikut merupakan lirik lagunya:

Gambar 1. Lirik Lagu "Pohon Beringin"



Sumber: Angkatan Bersendjata, 11 April 1971

Dalam lirik tersebut, pohon beringin digambarkan sebagai pohon rindang, indah, dan gagah perkasa yang menjadi simbol perlindungan yang menyiratkan peran Golkar sebagai pelindung dan pemersatu bangsa. Pada lirik "lambang persatuan Indonesia" dan "menuju kemakmuran bersama rakyat Indonesia" menunjukkan klaim ideologis bahwa Golkar merupakan wadah memperjuangkan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat secara inklusif. Sementara, penyebutan "riwayatnja yang termasjhur" menekankan pada sisi historis. Bahkan pada suatu kesempatan, salah seorang anggota Sekber Golkar Kodya Semarang, Abdul moekti, menyatakan bahwa simbol tersebut sebenarnya berasal dari Sunan Kalijaga. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sejak zaman Sunan Kalijaga mengharuskan penanaman pohon beringin di setiap alun-alun (Angkatan Bersendjata, 1971r). Selain itu, ada pula lagu-lagu lain yang merupakan adaptasi dari lagu-lagu yang sudah ada, tetapi konteks liriknya diganti bertemakan Golkar. Di antaranya terdapat lagu Panjang Umur, lagu Majulah Karyawan (adaptasi dari lagu Maju Tak Gentar), dan lagu Golkar Harus Berjuang (adaptasi dari lagu Bergembira) (Angkatan Bersendjata, 1971k).

Selain lagu-lagu, terdapat pula slogan dan pantun yang termuat pada halaman depan surat kabar Harian Angkatan Bersendjata. Isi kontennya berupa slogan pembangunan dan ajakan untuk memilih Golkar. Beberapa bunyi Slogan ajakan untuk memilih Golkar di antaranya "Tuku Tape Numpak Dokar Rame-Rame Njoblos Golkar" (Angkatan Bersendjata, 1971z), "Jang Nang Kedu, Adja Lali Mampir Tidar, Suk Pemilu, Adja Lali Njoblos Golkar" (Angkatan Bersendjata, 1971i), "Bojollai Karanganjar, Odjo Lali, Njoblos Golkar" (Angkatan Bersendjata, 1971d), "Demi Anak Tjutju Kita Pilihan Tepat Tanda Gambar Pohon Beringin" (Angkatan Bersendjata, 1971f), "Jang Sadar dan Waspada Pasti Memilih Golongan Karya" (Angkatan Bersendjata, 1971h), "Pilihan Terpertajaja

Adalah Golongan Karya" (Angkatan Bersendjata, 1971q), "Njoblos Nomer Lima Itulah Golongan Karya" (Angkatan Bersendjata, 1971x), "3 Djuli Hari Sabtu Golongan Karya Itulah Pilihan Djitu" (Angkatan Bersendjata, 1971b), "Buat Hari Depan Anak Tjutju Kita Ajo Kita Pilih Golongan Karya" (Angkatan Bersendjata, 1971e), "Di Kapak-2-no Aku Tetep Njoblos Golkar" (Angkatan Bersendjata, 1971g), "Tjobloslah Podjok Kanan Atas Pohon Beringin" (Angkatan Bersendjata, 1971y), dan "Kopat-Kapito Kojo Ulo Tapak Angin Antepku Tetep Lan Djedjeg Njoblos Wit Ringin" (Angkatan Bersendjata, 1971j). Tampak dari setiap kata yang ada selalu menekankan untuk memilih Golkar. Beberapa di antaranya ada yang menggunakan bahasa lokal (Bahasa Jawa) yang ringan dan familiar dengan masyarakat. Ini menjadi bagian dari strategi komunikasi yang dalam membangun kedekatan emosional antara Golkar dan Masyarakat. Adanya penekanan simbol visual, seperti "Pohon Beringin" semakin mengenalkan Golkar kepada pemilih.

Beberapa slogan yang mengusung tema pembangunan di antaranya: "Memilih Golongan Karya Berarti M'bangun Negara" (Angkatan Bersendjata, 1971m), "Memilih Golkar adalah Memilih Pembangunan" (Angkatan Bersendjata, 1971l), "Salah Satu Andilku Dlm Membangun Neg Adalah Memilih Golongan Karya" (Angkatan Bersendjata, 1971u), dan "Program Pembangunan Jang Realistis Dan Pragmatis Adalah Program Pembangunan Golongan Karya" (Angkatan Bersendjata, 1971s). Dari narasi tersebut dapat dilihat bahwa ada upaya untuk menempatkan Golkar sebagai aktor utama dalam pembangunan negara. Dalam kampanye, slogan-slogan tersebut menjadi sarana propaganda yang efektif dengan mengasosiasikan tindakan memilih golkar merupakan bentuk partisipasi aktif dalam pembangunan. Selain itu juga mengandung pesan normatif yang menegaskan bahwa rakyat dapat melakukan tindakan normatif dan berkontribusi langsung terhadap pembangunan negara dengan cara memilih Golkar. hal tersebut membuat rakyat menjadi merasa memiliki tanggung jawab moral mendukung Golkar dan mengesampingkan partai yang tidak mengusung pembangunan.

Dalam suatu pemberitaan, Menteri Dalam Negeri, Amir Machmud menyampaikan kepada seluruh Korps Karyawan agar tidak ragu untuk mencoblos tanda gambar "Pohon Beringin" yang merupakan lambang Golkar (Angkatan Bersendjata, 1971ad). Pada masa kampanye ini, gambar pohon beringin memang menjadi ikon yang menghiasi Kota Semarang. Kampanye Golkar dengan menggaungkan tanda gambar tidak hanya dilakukan secara verbal, tetapi secara visual juga diterapkan, baik di sepanjang jalan maupun dalam pemberitaan di surat kabar. "Semarang Penuh Pohon Beringin" begitulah judul suatu pemberitaan dalam Surat Kabar Angkatan bersendjata. Di tempat-tempat yang strategis, seperti di Simpang Lima dan Simpang Enam di Jalan Pemuda terpasang patung-patung setinggi 5 sampai 7 meter. Patung-patung tersebut berbentuk orang yang akan menusuk lambang Golkar (Angkatan Bersendjata, 1971ao). Selaras dengan pemberitaan tersebut, Suara Merdeka melalui kolom berita berjudul "Patung Raksasa Golkar Di Semarang" menyebutkan bahwa kala partai-partai politik yang lain belum tampak giat melakukan kampanye, Golkar justru sudah mulai melakukan pemasangan plakat-plakat, poster-poster, spanduk-spanduk, dan patung-patung kertas raksasa yang mampu menarik perhatian banyak orang. Patung-patung tersebut terlihat sebanyak 2 buah di Simpang lima dan 2 lainnya di Simpang Enam (suara Merdeka, 1971b). Selain kehadiran patung orang dengan pohon beringin, ditempel pula gambar atau bendera pohon beringin pada becak-becak. Baik, patung orang maupun gambar-gambar tersebut dipasang serentak pada tengah malam (Angkatan Bersendjata, 1971ao).

Gambar 2, 3, 4: Patung-Patung dan Tanda Gambar Golkar



Sumber: Angkatan Bersendjata, 28 April 1971; Suara Merdeka, 29 April 1971; Angkatan Bersendjata, 24 Mei 1971

Tidak hanya memberitakan mengenai “pohon beringin” disepanjang jalan di kota Semarang, dalam surat kabar juga terdapat tanda gambar tersebut yang dilengkapi dengan kalimat ajakan untuk mencoblos dalam pemilu nanti. Kalimat ajakan yang tertera di bawah gambar berbunyi “Tanda Gambar No.5. Kanan Atas Adalah Tanda Gambar Pilihanku” (Angkatan Bersendjata, 1971w). “Tanda Gambar No.5 Kanan Atas” mengarah pada lambang Golkar dan nomor urut dalam kertas suara. Sementara, narasi yang menegaskan “Tanda Gambar Pilihanku” terkesan personal yang berupaya menunjukkan bahwa dukungan oleh rakyat dilakukan secara sukarela. Pemasangan alat peraga kampanye seperti patung dan gambar di ruang publik yang strategis, seperti jalan utama atau pemukiman mampu meningkatkan visibilitas dan memperkuat kehadiran simbolik di tengah-tengah masyarakat. Ditambah dengan adanya kontribusi dari media massa, seperti surat kabar yang menampilkan tanda gambar membuat golongan ini semakin dikenal masyarakat. Simbol-simbol ini lah yang turut berkontribusi dalam meningkatkan citra di masyarakat (Sastrawati, 2015).

Dalam surat kabar Angkatan Bersendjata terdapat kolom khusus untuk pemberitaan Sekber Golkar dengan judul kolom “Berita2 Sekber”. Pemberitaannya menyangkut kegiatan para anggota, termasuk bergabungnya organisasi-organisasi atau kelompok. Dalam kurasi pemberitaan yang didapatkan, terdapat beberapa kelompok kerja yang bergabung. Di antaranya, karyawan pengemudi becak yang menyatakan diri bergabung. Mereka membentuk koperasi yang menyediakan onderdil becak dengan harga murah, poliklinik untuk pengemudi dan keluarga dengan biaya Rp 25,- (Angkatan Bersendjata, 1971aa). Setelah resmi bergabung, pihak sekber selama beberapa hari memberikan ceramah yang dilaksanakan di Bioskop Indra. Ceramah atau briefing juga diperuntukan kepada para karyawan Hotel Dibia Puri mengenai perjuangan Sekber Golkar dalam mencapai masyarakat adil dan makmur. Turut bergabung pula para pedagang Pasar Karangayu yang sejak tanggal 9 April 1971 sudah membentuk organisasi persatuan pedagang Pasar Karangayu. Tujuan dibentuknya organisasi tersebut untuk meningkatkan ekonomi pasar dan memenangkan Golkar (Angkatan Bersendjata, 1971ag). Selain itu, bertempat di Pasar Johar dibentuk wadah organisasi bernama “Karyawan Pedagang Etjeran” (Angkatan Bersendjata, 1971ah). Arief Budiman, menjelaskan bahwa Golkar melalui surat kabar berupaya membentuk identitasnya sebagai representasi “rakyat pekerja” (Budiman, 1990). Dengan adanya pemberitaan di atas menunjukkan bahwa golongan ini berhasil mendapatkan dukungan dari kalangan pekerja.

Untuk lebih mengenalkan program-program Golkar, diadakan pula kegiatan pawai yang sering disebut sebagai “Pawai Besar”. Dalam pemberitaan, Sekber Golkar Semarang tercatat beberapa kali melaksanakan pawai besar. Pada tanggal 30 Mei 1971, Sekber Golkar daerah tingkat III Kecamatan Semarang Utara mengadakan pawai besar bertemakan “Kesadaran Golkar”. Kegiatan tersebut diikuti seluruh massa Golkar Kecamatan Semarang Utara tanpa *dropping* beserta kinoninya, meliputi alat-alat pembangunan dan hasil karyanya serta semua team kesenian. Pawai akan dimulai pukul 14.00 dengan rute dimulai dari Jl. Kepodang 66 dilanjutkan ke arah Jl. R. Patah, Jl. Patimura, Jl. Dr. Tjipto, Jl. Majapahit, Jl. M.T. Haryono, Jl. A. Salim, dan berakhir kembali di Jl. Kepodang 66 (Angkatan Bersendjata, 1971o). Pawai tersebut tercatat diikuti oleh kurang lebih

sebanyak 50.000 massa dengan panjang pawai mencapai 10 km. Dalam surat kabar tersebut menyebutkan bahwa banyaknya massa yang turut serta dalam pawai tersebut menunjukkan besarnya tekad masyarakat untuk memenangkan Golkar (Angkatan Bersendjata, 1971a). Pawai tersebut turut dihadiri oleh Sekber Golkar tingkat desa hingga kino-kino kecamatan dan unit-unit perusahaan/pabrik yang ada di dalam wilayah Semarang Utara. Turut hadir pula drumband pemuda/pemudi, team kesenian seperti wayang orang dan reog, bahkan hingga pawang ular. Beragamnya kelompok yang hadir pada pawai tersebut menunjukkan bahwa Golkar mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan.

Pawai besar akan kembali dilakukan pada tanggal 20 Juni 1971, yang pada kesempatan ini mengusung tema pembangunan dan tercatat sebagai pawai terbesar sepanjang sejarah Kota Semarang (Angkatan Bersendjata, 1971v) (Suara Merdeka, 1971e). Pawai tersebut diadakan oleh Sekber Golkar tingkat II Kodya Semarang dan diikuti oleh kurang lebih sekitar 80% warga (Angkatan Bersendjata, 1971c). Kegiatan baru dimulai pukul 08.30 yang diawali oleh masa Golkar Kecamatan Semarang Barat, disambung oleh Masa Golkar dari Kecamatan Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Timur, dan Semarang Selatan dan berakhir pada 18.00. Rute yang akan dilalui berjalan kaki melewati lapangan pancasila, jalan pandanaran,ugu muda, jalan pemuda, jembatan berox, jalan mpu tantular, jalan stasiun tawang, dan bubar di stasiun tawang (Angkatan Bersendjata, 1971p) (Suara Merdeka, 1971g). Seluruh kelurahan, barisan pemuda Golkar, dan kino-kino dalam lima kecamatan turut menghadiri pawai tersebut. Selain itu, hadir pula karyawan-karyawan semua instansi pemerintahan termasuk guru-guru dari semua sekolah, perusahaan-perusahaan swasta, golongan-golongan wanita, pemuda, pelajar mahasiswa dan golongan-golongan masyarakat lainnya.

MARJINALISASI SIMBOLIK VS REPRODUKSI LOYALITAS

Dalam kampanye pemilu, marjinalisasi simbolik merupakan proses sistematis yang secara sengaja meminggirkan kelompok tertentu dari ruang publik. Akibatnya, akses dan pengaruh dalam demokrasi menjadi terbatas. (Muniarti, 2004), menjelaskan bahwa marjinalisasi dipahami sebagai proses mengabaikan hak yang seharusnya diperoleh pihak tertentu, termasuk dalam konteks politik ketika mereka tidak diberi hak yang setara untuk melakukan kampanye dan mendapat ruang pemberitaan. Surat kabar sebagai salah satu media komunikasi politik seringkali hanya memberitakan kelompok-kelompok yang loyal terhadap pemerintah, seperti para pekerja yang bergabung dengan Golkar. Sementara, pihak oposisi akan terabaikan atau bahkan dicitrakan secara negatif. Isu negatif yang sering muncul adalah mengenai bahaya kebangkitan dari sisa-sisa G30S/PKI. Isu ini digunakan untuk menekan pergerakan sisa-sisa anggota PKI atau kelompok yang berafiliasi dengan golongan kiri dan memiliki potensi bersebrangan secara politik. Dalam hal ini, surat kabar memainkan peran menyebarluaskan narasi mengenai ancaman komunisme dan memposisikan Golkar sebagai satu-satunya kekuatan politik yang mampu menjamin stabilitas serta menjaga ideologi negara.

Himbauan mengenai bahaya terhadap sisa-sisa G30S/PKI turut disuarakan oleh Pangdam VII/ Diponegoro, Mayjen Widodo yang disampaikan ketika menyerahkan berkas perkara kasus tersebut kepada Jaksa Tinggi Jateng. Pangdam dalam penuturannya mengatakan bahwa ada kemungkinan dilakukan *comeback* oleh sisa-sisa G30S/PKI (Angkatan Bersendjata, 1971af) (Suara Merdeka, 1971f). Penuturan serupa sebenarnya tidak hanya disampaikan di Kota Semarang, tetapi disampaikan juga di Klaten oleh Ketua I Dewan Pimpinan Harian Sekber Golkar Pusat Mayjen H. Soegandhi yang menegaskan bahwa kalau Golkar kalah dalam pemilu nanti, maka yang menang bukan parpol, tetapi PKI. Hal ini disampaikan karena dari 3 juga anggota PKI, baru ada 100.000 yang berhasil diringkus. Untuk itu, masih sangat rawan adanya sisa-sisa PKI yang akan memanfaatkan momentum pemilu guna melanggengkan kepentingannya (Angkatan Bersendjata, 1971al). Sementara itu, Golkar selalu dicitrakan sebagai “Kaum Pembaharu” yang akan memajukan negara melalui program pembangunan (Angkatan Bersendjata, 1971n). Hal tersebut membuat Golkar yang pada awalnya diragukan menjadi diunggulkan. Terlebih karena rakyat juga perlahan mulai sadar

mengingat kenangan kelam adanya peristiwa G30S/PKI dan NASAKOM (Angkatan Bersendjata, 1971ab).

Bersamaan dengan adanya marjinalisasi politik, ada pula reproduksi loyalitas yang merupakan upaya sistematis untuk mempertahankan dan melanggengkan kesetiaan masyarakat terhadap kekuasaan atau ideologi tertentu. Sikap loyalitas tidak dapat terbentuk secara instan, tetapi harus direproduksi secara berulang melalui pesan dan kontrol informasi. Berbagai cara dilakukan oleh Golkar dalam melakukan reproduksi loyalitas, termasuk melalui slogan, lagu, dan pemberitaan positif yang sudah dijejaskan di atas. Salah satu bentuk mempertahankan loyalitas anggotanya dapat dilihat dari fasilitas yang didapatkan oleh para karyawan becak yang tergabung dalam Sekber Golkar. melalui Dandim 0733 Semarang, membuka dua balai pengobatan dengan tarif semurah mungkin yang bertempat di Jl. M.T. Haryono1 Semarang dan di Jl. Suyudono 17 Semarang. Praktik pengobatan dilayani oleh dua dokter, yaitu dr. Soehardjo dan dr. Nardho Gunawan. Praktik dibuka setiap hari senin - jumat antara pukul 16.00 – 19.00 dan tidak hanya untuk karyawan becak saja, tetapi juga dibuka untuk umum (Angkatan Bersendjata, 1971aj).

Meskipun terdapat banyak pemberitaan yang membangun citra positif dan berpihak pada Golkar yang banyak ditemukan dalam surat kabar Angkatan Bersendjata. Namun, dalam surat kabar Suara Merdeka ditemukan pemberitaan yang kontra terhadap Golkar. Dalam pemberitaan tersebut menyatakan bahwa kampanye yang selama ini berjalan dengan tenang sudah mulai dicemari dengan tindakan kasar dan nada mengejek. Dalam suatu pemberitaan dijelaskan bahwa terjadi perobekan terhadap tanda gambar Golkar. Perobekan tersebut terjadi di daerah sekitar Kalisari di Jl. Dr. Sutomo. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa pelakunya adalah seorang pemuda yang tinggal di sebuah kios kembang di daerah tersebut. Ketika pelaku dan pemilik kios kemudian dipanggil oleh RT di kampung Wonosari, ia langsung mengakui perbuatannya. Sementara, pemilik kios yang sebenarnya sudah mengetahui perbuatan pemuda tersebut tetapi memilih untuk tidak melaporkan. Tidak dijelaskan secara pasti mengapa dirinya tidak membuat laporan dan ketika ditanya justru berakhir dengan adu pukul. Keduanya kemudian dibawa ke Kodim 0733 Kotamadya Semarang untuk penyelidikan lebih lanjut (Suara Merdeka, 1971d).

Selain melalui tulisan, tindakan kontra terhadap Golkar juga dilakukan melalui tulisan yang bernada kasar dan mengejek. Hal tersebut tampak dari foto yang dilampirkan dalam surat kabar menunjukkan adanya tulisan-tulisan bernada kasar yang ditujukan kepada Golkar. Tulisan tersebut terdapat di Jl. Gendingan Semarang dengan isi berbunyi "Gol-Pol Djangan Banjak Batjot" yang berarti jangan banyak cocot. Dalam Bahasa Jawa berasal dari kata "cocot" yang bermakna "mulut", tetapi bernuansa kasar. Tulisan tersebut berada tepat di bawah tulisan "Gol-Kar Akan Membangun" yang selalu digaungkan di mana-mana. Jika ditelaah, pihak yang menulis kata-kata kasar tersebut menganggap Golkar terlalu banyak bicara, terutama mengenai pembangunan. Tulisan lainnya yang bernada kasar terdapat di sebuah WC umum yang tidak jauh dari lokasi tulisan sebelumnya. Tulisan yang dimaksud berbunyi "WC Golkar untuk Umum" (Suara Merdeka, 1971b). Dengan adanya tindakan perobekan tanda gambar dan tulisan-tulisan bernada kasar, serta mengejek menunjukkan adanya ekspresi perlawanan simbolik terhadap dominasi politik Golkar pada saat itu. Mereka yang kontra memanfaatkan ruang publik sebagai sarana menyampaikan kritik. Ini dilakukan karena mereka tidak memiliki kanal politik formal atau media massa sebagai wadah untuk menyampaikan kritik utamanya kepada penguasa. Tindakan ini mengindikasikan meskipun Golkar telah berupaya membentuk citra positifnya, tetap masih ada celah bagi masyarakat mendapat ruang untuk mengartikulasikan resistensi secara informal dan tidak terorganisir.

REPRESI LUNAK UNTUK STABILITAS POLITIK

Represi lunak mengarah pada bentuk pengendalian sosial dan politik yang dilakukan tanpa kekerasan, melainkan dengan cara yang halus melalui mekanisme simbolik, moral, dan intelektual yang terstruktur dan sistematis. Sejalan dengan pemikiran Louis Althusser tentang aparatur ideologis negara (ideological state apparatus), yang mana dalam menjalankan kekuasaan negara tidak hanya melalui pemaksaan fisik (repressive state apparatus), tetapi juga melalui produksi dan reproduksi

makna dalam ruang kultural, termasuk media massa. Tujuannya untuk membentuk opini publik, membatasi ruang gerak oposisi, dan secara tidak langsung menciptakan kepatuhan rakyat secara sukarela (Cahyadi, 1992). Dalam konteks pemilihan umum, represi lunak merujuk pada strategi pengendalian politik dengan membatasi ruang kampanye, mengendalikan birokrasi, dan mengatur media massa. Represi lunak melalui media massa menjadi upaya sistematis dalam mengendalikan dan membatasi akses serta narasi dalam pemberitaan. Berbagai cara halus yang digunakan dapat melalui framing berita, seleksi sumber informasi, hingga pembatasan porsi antara partai atau golongan yang berafiliasi dengan penguasa dan oposisi (Fermana & Zetra, 2022). Perbedaan ini membuat porsi pemberitaan menjadi tidak seimbang. Penguasaan media massa memberikan peluang lebih besar kepada partai atau golongan yang berkuasa untuk membangun citra positif secara konsisten, menonjolkan program-program unggulan dan keberhasilan pemerintah, serta menutupi kelemahan atau kritik yang dilontarkan (Heri, 2016). Dalam hal ini, seperti yang sudah dijelaskan di atas, Golkar seringkali menggaungkan mengenai program-program pembangunan dan menunjukkan betapa besarnya dukungan rakyat melalui banyaknya massa yang menghadiri pawai kampanye.

Walaupun surat kabar Angkatan Bersendjata dan Suara Merdeka memuat pemberitaan mengenai Golkar, tetapi dapat dilihat ada perbedaan porsi pemberitaan dengan partai lain. Pemberitaan dalam surat kabar Angkatan Bersendjata didominasi oleh Golkar yang selalu muncul pada halaman utama, bahkan memiliki kolom khusus untuk memberitakan tentang kegiatan sekber-sekbernya. Hal ini tidak terlepas dari peran ABRI sebagai pengelola surat kabar tersebut, yang mana sudah pasti berafiliasi dengan Golkar dan pemerintahan Orde Baru. Sebaliknya, bagi Suara Merdeka yang sebagian karyawannya memutuskan untuk bergabung dalam Sekber Golkar (Suara Merdeka, 1971h), menyatakan bahwa mereka merupakan media yang independent, serta tidak terafiliasi dengan partai manapun termasuk Golkar dan pemerintah Orde Baru (Suara Merdeka, 1971i). Oleh karena itu, pemberitaan dalam Suara Merdeka mengenai kontestasi pemilu 1971 tampak memberikan porsi yang relatif seimbang bagi kontestan lain. Bahkan, Suara Merdeka turut memberitakan hal-hal unik ketika berlangsungnya pemilu, seperti pemberitaan mengenai keunikan bilik pemungutan suara yang ada di kompleks WTS menggunakan penutup dari kain-kain spreng yang bercorak dan berwarna terang (Suara Merdeka, 1971a). Hal ini, menunjukkan bahwa Suara Merdeka tidak hanya berfokus pada hal-hal bersifat politik, tetapi juga menunjukkan realita di masyarakat.

Keberhasilan represi lunak oleh Golkar tampak pada hasil pemilu 1971 di Kota Semarang. Golkar berhasil mendominasi suara elektoral dan keluar sebagai pemenang. Berikut merupakan hasil pemilu 1971 di Kota Semarang:

Tabel 2: Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Umum 1971 di Kotamadya Semarang

No.	Nama Golongan/Parpol	Jumlah Suara
1.	Katholik	12.632
2.	PSII	1.373
3.	NU	40.688
4.	Parmusi	7.770
5.	Golkar	166.512
6.	Parkindo	7.353
7.	Murba	402
8.	PNI	47.205
9.	Perti	453
10.	IPKI	1.186

Sumber: Semarang Dalam Angka Tahun 1973

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Golkar berhasil mengalahkan partai-partai besar yang mendominasi pada pemilu sebelumnya, seperti PNI dan NU. Perbandingan perolehan suara pun sangat signifikan di mana Golkar memperoleh 166.512 suara atau 58% dari total suara pemilih. Sementara, PNI berada di urutan kedua dengan perolehan suara sebanyak 47.205 suara dan diikuti NU dengan 40.688 suara (Biro Pusat Statistik, 1973). Dari hasil suara tersebut Golkar mendapatkan 19 kursi di DPRD. Berikut merupakan pembagian kursi DPRD Kotamadya Semarang:

Tabel 3: Pembagian Kursi DPRD Kotamadya Semarang

No	Nama Golongan/Parpol dan Anggota yang diangkat	Jumlah Suara	Kursi yang Didapatkan	Jumlah Anggota DPRD
1.	Katholik	10	1	1
2.	PSII	6	-	-
3.	NU	24	5	5
4.	Parmusi	15	1	1
5.	Golkar	40	19	19
6.	Parkindo	6	1	1
7.	Murba	4	-	-
8.	PNI	17	5	5
9.	Perti	1	-	-
10.	IPKI	6	-	-
11.	Anggota yang Diangkat	-	8	8

Sumber: Semarang Dalam Angka Tahun 1973

Kemenangan tersebut tentu tidak dapat dipisahkan dari adanya kebijakan “massa mengambang” yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru dengan tujuan membatasi partisipasi politik masyarakat, khususnya di tingkat pedesaan dan lapisan bawah. Sistem tersebut yang menghambat partai-partai besar seperti PNI dan NU yang sudah lebih dahulu mendominasi di Kota Semarang menjadi kesulitan mendapatkan dukungan rakyat. Ini dikarenakan rakyat diarahkan untuk fokus pada objek pembangunan, sehingga dukungan akan mengalir ke Golkar. faktor lain yang turut memengaruhi adalah keterlibatan aparat, termasuk Walikota Semarang yang memberikan instruksi untuk memenangkan Golkar kepada Camat dan Lurah (Juniardi, 2006). Ditambah dengan penerapan strategi melalui jalur ABG dan represi lunak melalui media massa utamanya, suat kabar membuat prgram-program Golkar semakin dikenal oleh rakyat.

Setelah meraih kemenangan tersebut, Pemerintah Orde Baru kemudian segera membuat kebijakan yang dapat kemenangannya pada pemilu berikutnya. Kebijakan tersebut di antaranya meresmikan pendirian Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI). Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971, korps tersebut resmi didirikan pada tanggal 29 November 1971. Korps ini berfungsi sebagai wadah tunggal bagi para PNS dan menjadi kekuatan politik Golkar, sejalan dengan kebijakan monoloyalitas. Melalui ini, pemerintah jug dapat memastikan bahwa selain menjalankan tugas administratif, pegawai negeri juga dapat berperan sebagai stabilisator politik dan mensukseskan pembangunan nasional. Selanjutnya, wacana mengenai penggabungan partai (Suara Merdeka, 1971c), kemudian juga direalisasikan pada tahun 1973. Pemerintah mengeluarkan kebijakan fusi partai politik, yang mana mendesak partai-partai politik untuk melebur menjadi dua. Pertama, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang terdiri dari partai-partai islam seperti NU dan Parmusi. Kedua, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang terdiri dari partai-partai non Islam seperti PNI, Katolik, Kristen, Murba, dan IPKI.

PENUTUP

Pemilu 1971 menandai momen penting dalam sejarah politik Indonesia, terutama terkait pembentukan kekuasaan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Orde Baru, melalui entitas politik Golongan Karya (Golkar), berhasil mendominasi lanskap politik nasional, terutama di wilayah strategis penting seperti Kota Semarang. Kemenangan Golkar tidak terjadi secara natural dalam sebuah kompetisi demokratis yang sesungguhnya, melainkan melalui manipulasi politik yang sistematis. Aspek mendasar dari pencapaian ini adalah strategi “massa mengambang”, yang membatasi keterlibatan politik di kalangan masyarakat kelas bawah dan pedesaan, sehingga melumpuhkan dinamika kelompok-kelompok oposisi seperti PNI dan NU. Program ini berusaha untuk membentuk masyarakat apolitis yang hanya setia kepada pemerintah melalui entitas tunggal, Golkar. Dalam mengejar strategi dominasi kekuasaannya, pemerintah menjalankan strategi ABG (ABRI, Birokrasi, Golkar), yang mengubah militer dan birokrasi menjadi instrumen politik yang aktif untuk mendukung dan mengkampanyekan Golkar, termasuk memberikan tekanan kepada personil sipil untuk mempertahankan monoloyalitas.

Di Kota Semarang, supremasi Golkar diperkuat oleh dukungan ABRI dan birokrasi sipil, yang secara aktif terlibat dalam penasihat politik, pengamanan kampanye, dan pembentukan opini publik. Media massa, terutama harian Angkatan Bersenjata, memperkuat hal ini sebagai saluran propaganda politik Golkar. Golkar menggunakan simbol-simbol seperti pohon beringin, lagu-lagu kampanye, mantra-mantra pembangunan, dan liputan media yang dibuat secara strategis untuk membangun citranya sebagai partai yang kontemporer, stabil, dan pro-buruh. Liputan media sengaja dirancang untuk menggambarkan Golkar sebagai satu-satunya entitas politik yang mampu memajukan bangsa, sambil merendahkan dan mengesampingkan pihak yang berseberangan. Narasi kampanye penuh dengan retorika anti-komunis, yang berasal dari trauma G30S/PKI, sehingga membuat masyarakat mengaitkan oposisi dengan risiko terhadap stabilitas nasional. Surat kabar yang aktif memberitakan kampanye di Kota Semarang adalah Angkatan Bersenjata dan Suara Merdeka. Meskipun kedua surat kabar tersebut memberitakan Golkar, tetapi terdapat perbedaan dalam prosi pemberitaan. Angkatan Bersenjata yang berada di bawah naungan ABRI dan berafiliasi dengan Orde Baru cenderung lebih dominan menampilkan Golkar, bahkan menyediakan kolom khusus. Sebaliknya, suara Merdeka meskipun beberapa anggotanya bergabung dalam Sekber Golkar, tetap menyatakan diri independen dan memberi ruang pemberitaan yang lebih seimbang bagi partai-partai lain.

Dampak dari strategi komunikasi ini terlihat pada pawai berskala besar, penempatan simbol-simbol di tempat umum, dan dukungan dari berbagai kelompok, termasuk pedagang, tukang becak, dan organisasi perempuan yang terkait dengan istri tentara, yang semuanya dimobilisasi untuk mengamankan kemenangan bagi Golkar. Hasilnya, pada Pemilihan Umum 1971 di Kota Semarang, Golkar meraih persentase suara tertinggi, yaitu 58%, melampaui partai-partai besar yang sebelumnya dominan. Kemenangan ini menandai dimulainya kebijakan struktural pasca-pemilu, termasuk pembentukan Korpri (Korps Pegawai Republik Indonesia) pada tanggal 29 November 1971, dan penggabungan partai-partai politik pada tahun 1973. Keduanya dimaksudkan untuk meningkatkan otoritas pemerintah atas birokrasi dan sistem kepartaian. Korpri berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat komitmen pegawai negeri sipil terhadap pemerintah, sementara penggabungan partai-partai politik merampingkan oposisi menjadi dua entitas utama, yaitu PPP dan PDI. Akibatnya, Pemilu 1971 bukan hanya sekedar pemilihan umum, tetapi juga merupakan tonggak penting dalam pembentukan struktur politik otoriter Orde Baru yang dibungkus dengan retorika demokrasi dan kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, N. R., Wasino, & Wijayati, P. A. (2019). Kampanye Partai-Partai Politik Menjelang Pemilihan Umum 1955 Di Kota Semarang (Studi Kasus PNI, PKI, Nu, dan Masyumi). *Journal of Indonesian History*, 8(1), 62–71. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jih>
- Al Izzati, R., Dartanto, T., Suryadarma, D., & Suryahadi, A. (2024). Direct elections and trust in state

- and political institutions: Evidence from Indonesia's election reform. *European Journal of Political Economy*, 85(June), 102572. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2024.102572>
- Angkatan Bersendjata. (1971a). 10 Km Pawai Golkar Ketjamatan Semarang Utara Tanpa Drop2an= Setjara Praktis Wilajah Semarang Utara Dilingkar Oleh Peserta Pawai Golkar.
- Angkatan Bersendjata. (1971b). 3 Djuli Hari Sabtu Golongan Karya Itulah Pilihan Djitu.
- Angkatan Bersendjata. (1971c). Baik Sebagai Peserta Maupun Sebagai Penonton, Maka Hampir 80 pCt Rakjat Kodya Semarang Mengikuti Pawai Pembangunan Golkar -pawai terbesar dalam sedjarah -suasana kota dibuatnja seperti hari raya.
- Angkatan Bersendjata. (1971d). Bojolali Karanganjari Odjo Lali, Njoblos Golkar.
- Angkatan Bersendjata. (1971e). Buat Hari Depan Anak Tjutju Kita Ajo Kita Pilih Golongan Karya.
- Angkatan Bersendjata. (1971f). Demi anak Tjutju Kita Pilihan Tepat Tanda Gambar "Pohon Beringin."
- Angkatan Bersendjata. (1971g). Di Kapak-2-no Aku Tetep Njoblos Golkar.
- Angkatan Bersendjata. (1971h). Jang Sadar dan Waspada Pasti Memilih Golongan Karya.
- Angkatan Bersendjata. (1971i). Jen Nang Kedu, Adja Lali Mampir Tidar Suk Pemilu, Adja Lali Njoblos Golkar.
- Angkatan Bersendjata. (1971j). Kopat-Kapito Kojo Ulo Tapak Angin Antepku Tetep Lan Djedjeg Njoblos Wit Ringin.
- Angkatan Bersendjata. (1971k). Lagu-2 Golkar "Golkar Menang."
- Angkatan Bersendjata. (1971l). Memilih Golkar adalah Memilih Pembangunan.
- Angkatan Bersendjata. (1971m). Memilih Golongan Karya Berarti M'bangun Negara.
- Angkatan Bersendjata. (1971n). Mengapa Golkar Terdjun Dalam Pemilu?
- Angkatan Bersendjata. (1971o). Pawai Besar "Kesadaran Golkar" Semarang Utara.
- Angkatan Bersendjata. (1971p). Pawai Besar P'bangunan Golkar" Jg. Terpanjang Di Semg.
- Angkatan Bersendjata. (1971q). Pilihan Terpertjaja Adalah Golongan Karya.
- Angkatan Bersendjata. (1971r). Pohon Beringin Warisan Sunan Kalidjaga.
- Angkatan Bersendjata. (1971s). Program Pembangunan Jang Realistis Dan Pragmatis Adalah Program Pembangunan Golongan Karya.
- Angkatan Bersendjata. (1971t). Rakjat Indonesia Hrs Diatur Sesuai Dengan Proffesinja =Tidak Hanja Digunakan Sebagai "Kuda Tunggang"nja Politik.
- Angkatan Bersendjata. (1971u). Salah Satu Andilku Dlm Membangun Neg Adalah Memilih Golongan Karya.
- Angkatan Bersendjata. (1971v). Semarang Akan Dipenuhi Oleh Massa Golkar -Pawai Besar Golkar Hari MingguTgl 20 Djuni 1971 dimulai Djam 08.00 Pagi -Dalam Rangka Memastikan Perdjoangan Golkar Utk Memenangkan Orde Baru.
- Angkatan Bersendjata. (1971w). Tanda Gambar No.5 Kanan Atas Adalah Tanda Gambar Plihanku.
- Angkatan Bersendjata. (1971x). Tjoblos Nomer Lima Itulah Golongan Karya.
- Angkatan Bersendjata. (1971y). Tjobloslah Podjok Kanan Atas Pohon Beringin.
- Angkatan Bersendjata. (1971z). Tuku Tape Numpak Dokar Rame-rame Njoblos Golkar.
- Angkatan Bersendjata. (1971aa, April 10). Karyawan Pengemudi Betjak Bergabung Dalam Golkar.
- Angkatan Bersendjata. (1971ab, April 11). Kenapa Golkar Akan Menang?
- Angkatan Bersendjata. (1971ac, April 11). Pohon Beringin.
- Angkatan Bersendjata. (1971ad, April 14). Kalau Golkar Menang Tak Akan Ada Kerewelan Dibidang Politik = Kepala Daerah Jg. Tidak dpt. Mem-Pantjasil-kan Daerahnja Di-Kondite Buruk Sekali.
- Angkatan Bersendjata. (1971ae, April 15). Penjegaran Pengurus PERIP"/ Sekber Golkar Tjabang Kodya Semarang.
- Angkatan Bersendjata. (1971af, April 15). Tetap Waspada Tdp Sisa2 G 30 S/PKI Mendjelang Pemilu.
- Angkatan Bersendjata. (1971ag, April 16). Pedagang Pasar Karangaju Masuk Golkar.
- Angkatan Bersendjata. (1971ah, April 20). Pengumuman Pendaftaran Masuk Menjadi Anggauta Karyawan Pedagang Etjeran Sekber-Golkar Kodya Semarang.
- Angkatan Bersendjata. (1971ai, April 22). Djam 0.00 Selasa Jad. Dimulai K'mpanje.
- Angkatan Bersendjata. (1971aj, April 22). Obat Murah Bagi Karyawan Betjak.

- Angkatan Bersendjata. (1971ak, April 22). *Warga Asrama KusumaWardani Dapat Penerangan Pemilu.*
- Angkatan Bersendjata. (1971al, April 24). *Kalau Golkar Kalah Jg. Menang Bukan Parpol.*
- Angkatan Bersendjata. (1971am, April 26). *Ment. Amir Machmud Punja Bukti-Bukti Akan timbulnja Lagu Lama =Jg Berdtujuan Merobah Pantjasila & UUD'45 = De-Parpolisasi Pegawai Negeri Djustru Memantapkan Pantjasila Dan UUD'45.*
- Angkatan Bersendjata. (1971an, April 26). *Pendjelasan Tentang Pemilu Untuk Ibu2 Warakawuri KODIM 0733.*
- Angkatan Bersendjata. (1971ao, April 28). *Semarang Penuh "Pohon Beringin."*
- Ashadi Siregar. (2000). Media Pers Dan Negara: Keluar Dari Hegemoni. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(2), 171–196.
- Bangun, R. (1997). *Dari Sekber Golkar Menjadi Golkar.* DPP Pusat Golkar.
- Baum, C. L., & Owens, M. F. (2023). Does personal door-to-door campaigning influence voters? Evidence from a field experiment. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 105(April), 102043. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2023.102043>
- Biro Pusat Statistik. (1971). *Kotamadya Semarang Dalam Angka Tahun 1971.* Biro Pusat Statistik.
- Biro Pusat Statistik. (1973). *Kotamadya Semarang Dalam Angka Tahun 1973.* Biro Pusat Statistik.
- Bittner, A., & Peterson, D. A. M. (2018). Introduction: Personality, party leaders, and election campaigns. *Electoral Studies*, 54(April), 237–239. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2018.04.005>
- Budiman, A. (1990). *State and Civil Society in Indonesia.* Clayton.
- Cahyadi, H. (1992). *"Louis Althusser, Telaah Negara dan Ideologi" Dalam Kemasyarakatan dan Kemanusiaan.* Gramedia.
- Crouch, H. (2007). *The Army and Politics in Indonesia.* Equinox.
- Dewantarina, A. (2012). Partai Nasional Indonesia Pada Pemilihan Umum Tahun 1955 Di Semarang. *Journal of Indonesian History*, 1(2), 71–77.
- Fahira, N. A. (2024). *Pseudo Democracy Dalam Orde Baru (1966-1977).*
- Fermana, R. A., & Zetra, A. (2022). Relasi Media Massa Dan Politik Pada Pemilihan Umum Presiden 2019. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 7(1), 71. <https://doi.org/10.24198/jwp.v7i1.32370>
- Gottschalk, L. (1975). *Mengerti Sejarah: Pengantar Metode Sejarah.* Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Heri, S. (2016). Pengaruh Media Massa Terhadap Citra Partai Politik. *Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(1), 214–226. <http://pengaruhmediamassa.blogspot.my/>
- Jenkins, D. (1984). *No Suharto and His Generals: Indonesian Military Politics, 1975-1983.* Cornell University.
- Juniardi, K. (2006). *Dominasi Golkar Kotamadya Semarang Dalam Pemilu Di Semarang Tahun 1971-1997.* Universitas Diponegoro.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1970.
- Kuntowijoyo. (2005). *Pengantar Ilmu Sejarah.* Bentang Pustaka.
- Kuntowijoyo. (2008). *Penjelasan Sejarah.* Tiara Wacana.
- Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *partai politik dan sistem pemilihan umum di Indonesia.*
- Mackie, J. A. C. (1970). Civil-military relations and the 1971 elections in Indonesia. *Australian Outlook*, 24(3).
- Muniarti, N. P. (2004). *Getar Gender: Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum, dan HAM.* Indonesia Tera.
- Poeponegoro, M. D. (2008). *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik.* Balai Pustaka.
- Puspita, N. E. (2012). Strategi Politik Dan Kemenangan Golkar Di Semarang Pada Pemilu 1971. *Journal of Indonesian History*, 1(1), 30–34.
- Putra, D. K. S. (2012). *Media dan Politik: Menemukan Relasi antara Dimensi Simbiosis-Mutualisme*

Media dan Politik. Graha Ilmu.

- Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Roslan, R. (2005). *Kiat dan Strategi Kampanye: kampanye public relation*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sastrawati, N. (2015). Simbolisme dalam Pencitraan Partai Politik. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 4(1), 168. <https://doi.org/10.24252/ad.v4i1.1499>
- suara Merdeka. (1971a). *Di semg. Terdaftar 313 Ribu Tjalon Pemilih*.
- suara Merdeka. (1971b, April 29). *"Patung Raksasa" Golkar Di Smg*.
- Suara Merdeka. (1971a). *Bilik "Tjoblosan" Jang Unik Dikompleks WTS*.
- Suara Merdeka. (1971b). *Dan Jang Mulai "Kasar."*
- Suara Merdeka. (1971c). *Di Indon. Tak Boleh Hanja Ada Satu Kekuatan Politik*.
- Suara Merdeka. (1971d). *Ditahan Krn Robek Tanda Gambar Golkar*.
- Suara Merdeka. (1971e). *Golkar Pawai Tgl. 20 Malam Hiburan Tgl 24*.
- Suara Merdeka. (1971f). *Parpol-Golkar Diserukan Tepati Statement Bersama 25 Maret 1971*.
- Suara Merdeka. (1971g). *Route Pawai Pembangunan Golkar Semg*.
- Suara Merdeka. (1971h). *Sebagian Karyawan Pertjetakan Semarang/Suara Merdeka Menggolong Golkar*.
- Suara Merdeka. (1971i). *Suara Merdeka Tetap Indepent Tak Afiliasi Partij Politik Manapun Djuga Tak Masuk Golkar*.
- Sundhaussen, U. (1982). *The Road to Power: Indonesian Military Politics 1945-1967*. Oxford University Press.
- Suryadinata, L. (2002). *Elections and Politics in Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Ufen, A. (2009). The Rise of Political Parties in Indonesia: Between Institutionalization, Identity, and Patronage. *South East Asia Research*, 17(1).
- Van Dijk, C. (1992). The Indonesian general elections 1971–92. *School of Oriental & African Studies. Newsletter*, 20(58).
- Wijayati, P. A. (2009). *Research Arsip dan Bahan Pustaka*. Unesa University Press.